

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Negara Indonesia dengan hamparan laut terbesar di dunia memiliki luas 6.315.222 km². Di dalam sejarah Indonesia dikenal sebagai negara maritim, hingga saat ini jumlah pulau yang dimiliki Indonesia berjumlah 13.466 dengan jumlah penduduk yang tinggal didaerah pesisir mencapai 60%¹. Laut tidak bisa dilepaskan dari daratan tempat manusia bermukim, peran yang dimiliki wilayah pesisir dalam menghidupi masyarakat sangat besar, hal ini terlihat dari produksi hasil laut contohnya saja nilai sumberdaya hayati perikanan Indonesia mencapai US\$ 82 milyar per tahun dengan jumlah tenaga yang dapat diserap sekitar 10 juta orang per tahun, termasuk yang bekerja pada industri-industri maritim, migas dan perhubungan. Adapun data nelayan murni di Indonesia sekitar 1,96 juta orang². Dengan kondisi wilayah yang seperti ini, Indonesia masuk sebagai negara dengan wilayah laut terbesar di dunia.

Dalam memaksimalkan hasil laut dibutuhkan suatu perencanaan yang baik sesuai dengan karakter laut (wilayah pesisir). Secara umum, kondisi daratan dan pesisir berbeda baik secara tipologi maupun secara geografi/ administrasi, disebutkan dalam UU no. 26/2007 dan UU no. 27/2007 menjelaskan mengenai perencanaan darat dan laut yang memiliki perbedaan dalam proses penataannya (memiliki peraturan masing-masing). Sehingga apabila kawasan/wilayah pesisir mengadopsi/menggunakan tata cara penataan ruang darat akan menimbulkan kesenjangan dan atau ketimpangan pada pembangunan laut.

¹ Badan Informasi Geografi dan Hasil survey tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi 2007-2010; <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000>

² Kementerian Kelautan Perikanan, 2007

Hingga saat ini, kawasan pesisir yang di Indonesia berada pada fase pembangunan yang tertinggal³, hal ini berkaitan dengan kondisi jarak pulau terpisah dengan ibu kota negara dan kondisi geografis berjauhan membuat pihak pengembang sulit untuk melakukan pembangunan pada kawasan pesisir, selain itu terdapat pula kesalahan penerapan konsep pembangunan pada kawasan pesisir yang menimbulkan ketimpangan pembangunan disebabkan kesalahan penerapan konsep dengan kondisi pesisir. Pembangunan kawasan pesisir sangat bergantung pada kualitas manusia berdasarkan dari setiap proses interaksi untuk memaksimalkan potensi kawasan. Dengan memaksimalkan sumber daya manusia, maka manusia sebagai pengelola sumber daya alam akan menghasilkan pembangunan kawasan yang berkelanjutan karena setiap individu mengerti cara menganalisis, merencanakan dan mengelola potensi daerah termasuk sumber daya alam maupun buatan.

Di Indonesia terdapat satu cara dalam mengevaluasi pembangunan pada kawasan pesisir yaitu dengan melihat berdasarkan laporan data perhitungan Indeks Pembangunan Manusia yang dilakukan oleh badan pusat statistik, dimana setiap indikator yang terdapat pada IPM akan memperlihatkan pembangunan manusia pada satu kawasan. Kegiatan manusia di kawasan pesisir mempunyai intensiti yang cukup tinggi seperti industri, perbandaran, petempatan, perlombongan (Suprajaka, Poniman, & Hartono, 2005). Hakekatnya pembangunan itu sendiri memiliki tujuan akhir yakni manusia sebagai subjek dan objek untuk menghidupkan wilayah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa objek dari pembangunan adalah manusia⁴, dimana fokus dan sasaran akhir dari seluruh kegiatan pembangunan adalah untuk dinikmati oleh rakyat. Sasaran dan fokus tersebut dinilai dengan

³ Badan Informasi Geografi dan Hasil survey tim Nasional Pembakuan Rupa Bumi 2007-2010; <http://bakohumas.kominfo.go.id/news.php?id=1000>

⁴ Tambunan, 2003 : 40. Aditianata. 2014. Hal 25. Thesis. Universitas Indonesia

tercapainya pendapatan untuk mencapai hidup layak, peningkatan derajat kesehatan (usia hidup panjang dan sehat), dan meningkatkan pendidikan (kemampuan baca tulis dan keterampilan untuk dapat berpartisipasi dalam masyarakat dan kegiatan ekonomi).

Manusia merupakan pembentuk suatu daerah, dengan melakukan tinjauan dan perbaikan/peningkatan dalam pembangunan maka daerah tersebut dapat berkembang dengan baik. Dalam pembangunan, manusia adalah subjek dan objek, berarti manusia merupakan tolak ukur dalam menyusun pembangunan dan dalam meningkatkan kemajuan pembangunan. Sesuai dengan tujuan penelitian, pembangunan manusia pada kawasan pesisir sering ditinggalkan atau tidak tersentuh dikarenakan keterbatasan pengetahuan dari pihak pemerintah, masyarakat dan pengembang, sedangkan saat ini kawasan pesisir membutuhkan perhatian dan pembangunan yang sesuai dengan prioritas pada daerah tersebut.

Pulau Lembeh yang merupakan salah satu bagian administrasi di Kota Bitung, yang letak geografis terpisah selat yang memiliki kondisi pembangunan kurang. Berdasarkan APBD Kota Bitung, sektor ekonomi Pulau Lembeh menyumbangkan nilai pendapatan ke tiga terbesar di Kota Bitung, namun dengan kondisi geografis di kelilingi oleh selat dan laut serta berbukit menimbulkan permasalahan pada pembangunan manusia terkait indeks pembangunan manusia. Kondisi Pulau Lembeh ini membuat pemerintah sulit melakukan pembangunan, sedangkan pembangunan yang dilakukan oleh pihak pengembang tidak menyelesaikan permasalahan yang sebenarnya terjadi di masyarakat atau tidak menyelesaikan permasalahan ketimpangan menyangkut pembangunan manusia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kesalahan konsep pembangunan yang diterapkan membuat kawasan pesisir banyak

mengalami ketertinggalan/ketimpangan dalam pembangunan. Lokasi kawasan studi yang terpisah dari ibu kota kecamatan membuat pihak pengembang dan pemerintah kesulitan untuk menciptakan koordinasi pembangunan, sehingga tercipta gap/kesenjangan dalam pembangunan manusianya. Untuk mengatasi gap/kesenjangan pembangunan dibutuhkan pemahaman pembangunan yang tepat namun di wilayah studi kurangnya pemahaman dalam melakukan koordinasi menciptakan kesalahan dalam penerapan pembangunan yang membuat kesenjangan pembangunan. Jangka panjang yang dapat terjadi yaitu semakin tertinggalnya pembangunan (manusia) pada lokasi studi.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian dalam penyusunan Evaluasi Pembangunan Kawasan Pesisir Berdasarkan Data IPM adalah sebagai berikut :

1. Mengevaluasi Pembangunan Manusia di Kecamatan Lembeh Selatan berdasarkan indeks pembangunan manusia (IPM).
2. Merumuskan strategis perbaikan ketimpangan dalam pembangunan manusia di Kecamatan Lembeh Selatan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan mampu mengevaluasi pembangunan manusia dan mengurangi ketimpangan yang dihasilkan tidak hanya pada kawasan pesisir namun bagi seluruh bagian wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan untuk menghasilkan pembangunan yang berkelanjutan. Manfaat lain penelitian ini adalah untuk menjadi bahan masukan untuk peneliti selanjutnya dan sebagai acuan pemerintah khususnya yang berada di kawasan pesisir Pulau Lembeh.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Masyarakat pesisir seharusnya memiliki kehidupan yang baik, apabila dilihat dari kehidupan pesisir dibanding kota besar maka didapati perbedaan keadaan tempat tinggal yang jauh dari kebisingan, kurangnya polusi serta sumber daya alam yang besar dan bisa dikelola. Dengan demikian keadaan tersebut dapat membuat wilayah pesisir memiliki tingkat kesejahteraan yang baik apabila dikelola dengan metode yang sesuai dengan kondisi daerah yang mengikuti pedoman pembangunan berkelanjutan. Faktanya saat ini kawasan pesisir tidak bertumbuh dengan baik dan beberapa diantaranya mengalami ketimpangan di ekonomi daerah dan penunjang kehidupan masyarakat.

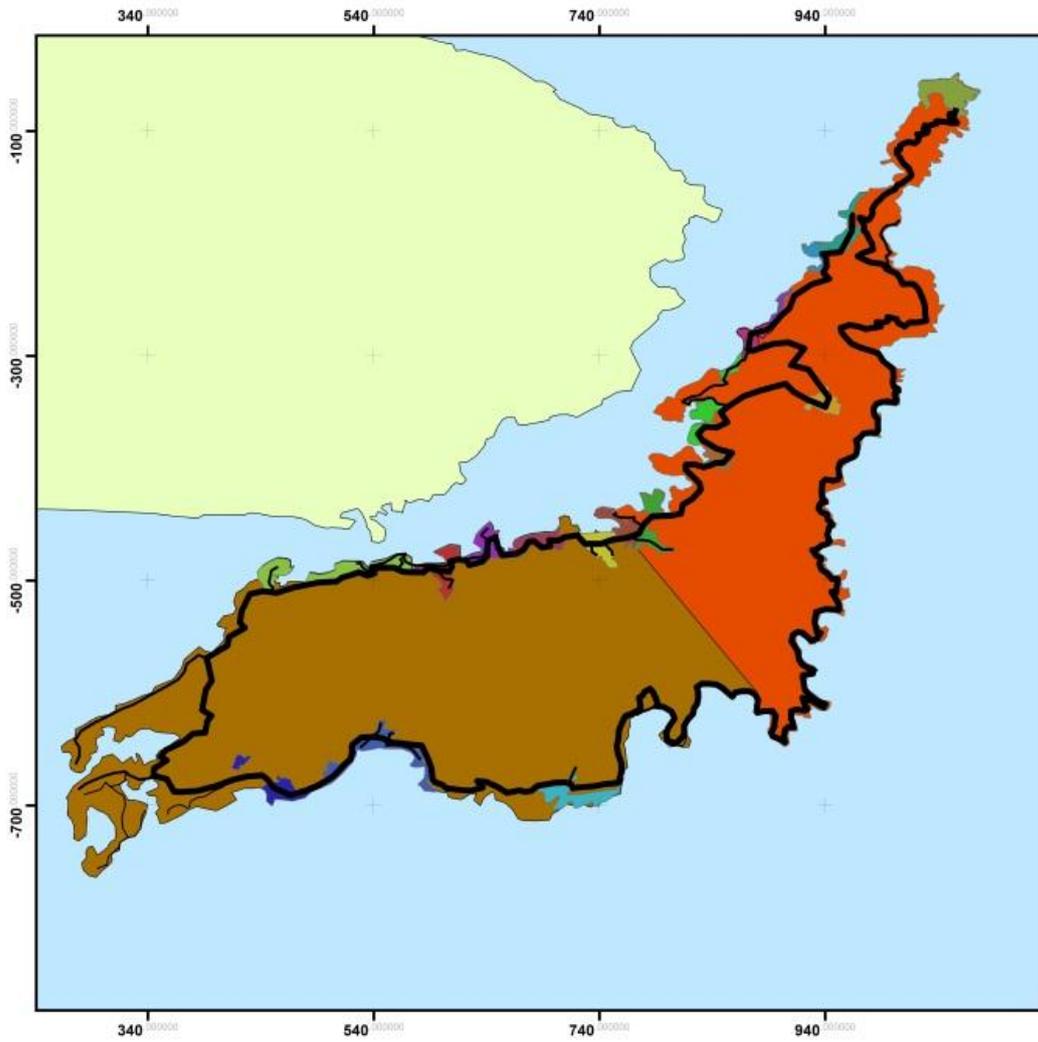
Ruang lingkup materi memberikan arahan dalam membahas penelitian terkait pembangunan manusia di Kecamatan Lembeh Selatan. Keseimbangan pembangunan merupakan bagian perencanaan dalam pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ketiga hal ini harus saling mengisi agar dapat menghasilkan keberlanjutan. Semua teori yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pada teori perkotaan namun tetap berorientasi pada kawasan pesisir dan kesesuaian terhadap karakteristik kawasan pesisir.

1.5.2 Ruang Lingkup Kawasan Penelitian

Ruang lingkup kawasan penelitian adalah kawasan pesisir Pulau Lembeh, Kota Bitung di Provinsi Sulawesi Utara. Pulau Lembeh memiliki dua Kecamatan yaitu Kecamatan

Lembeh Utara dan Kecamatan Lembeh Selatan. Sedangkan yang menjadi lokasi studi adalah Kecamatan Lembeh Selatan. Kecamatan Lembeh Selatan dipilih berdasarkan data dan kelengkapan informasi yang dapat mewakili keseluruhan Pulau Lembeh. Adapun batas lokasi Kecamatan Lembeh Selatan adalah sebagai berikut :

Bagian Utara	:	Lembeh Utara
Bagian Barat	:	Laut Maluku
Bagian Selatan	:	Laut Maluku dan Kab. Minut
Bagian Timur	:	Selat Lembeh dan Kota Bitung

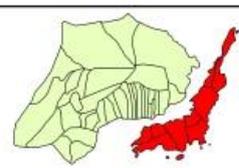


PETA 1.2
Batas Administrasi Pulau Lembeh



Legenda

- Jalan Penghubung**
- Jalan Sekunder
 - Jalan Gang/Penghubung
 - Jalan Sekunder
 - Penghubung Kecamatan
- Batas Administrasi**
- Kecamatan Lembeh Selatan
 - Kecamatan Lembeh Utara
 - Kota Bitung



JANO JOHAN RIEDEL
 2012 22 013